

# EKSPLOITASI KEMISKINAN SEBAGAI MODAL POLITIK DALAM RELASI KUASA DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019

Gabriela Sisilia Bunga Sani

NPP. 32.0649

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: [32.0649@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0649@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The persistence of poverty in regions like Kupang Regency remains a critical issue that deeply affects local political dynamics, particularly in the context of regional elections (Pilkada). Elite politicians often exploit poverty as a political tool by distributing material assistance to secure votes, fostering clientelistic relationships that undermine democratic quality. This study highlights the challenge of understanding how power relations are constructed through the exploitation of poverty within the electoral process.

**Purpose:** This study aims to analyze how poverty is exploited as political capital in the 2019 regional election of Kupang Regency and to examine the impact of such practices on the power relations between political elites and the poor. **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach to deeply understand the complex interactions between social and political power dynamics in the exploitation of poverty during the 2019 Kupang Regency local election. Data were collected through in-depth interviews with 10 informants who were purposively selected. The informants included low-income citizens, community leaders, election supervisors, and former campaign team members. The selection of these informants was based on the relevance of their knowledge and experiences related to the practice of vote-buying and the distribution of aid during the election period, which are the focal points of this study. In addition to interviews, data were also gathered through document analysis related to electoral policies and field observations to directly observe the social and political dynamics occurring within the community. This method was chosen to provide a more holistic and contextual understanding of the impact of poverty exploitation on political participation and the quality of local democracy. **Result:** The findings reveal that the exploitation of poverty operates through three dimensions of power: discipline, governmentality, and panopticism. These mechanisms shape voter behavior by normalizing transactional politics, managing public perception, and fostering a sense of surveillance, thereby reinforcing unequal power relations. **Conclusion:** The exploitation of poverty in Pilkada contributes to the perpetuation of clientelist structures and weakens democratic practices. Addressing this issue requires a multi-faceted approach involving citizen empowerment, electoral reform, and more robust oversight mechanisms.

**Keywords:** Political Clientelism, Poverty Exploitation, Local Elections

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemiskinan yang masih tinggi di daerah seperti Kabupaten Kupang menjadi permasalahan krusial yang memengaruhi dinamika politik lokal, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Elite politik kerap memanfaatkan

kemiskinan sebagai modal politik dengan mendistribusikan bantuan materi guna mengamankan dukungan suara, memperkuat hubungan klientelistik yang merusak kualitas demokrasi. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam memahami bagaimana relasi kuasa dibangun melalui praktik eksploitasi kemiskinan dalam proses pemilu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kemiskinan dieksploitasi sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2019 serta mengkaji dampaknya terhadap hubungan kuasa antara elite politik dan masyarakat miskin. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam interaksi kompleks antara kekuatan sosial dan politik dalam praktik eksploitasi kemiskinan di Pilkada Kabupaten Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang dipilih secara purposif. Informan terdiri dari berbagai kelompok yang relevan, yaitu warga miskin, tokoh masyarakat, pengawas pemilu, serta mantan tim sukses kandidat Pilkada. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait praktik politik uang dan pemberian bantuan menjelang pemilu, yang menjadi fokus utama penelitian. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui analisis dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pemilu, serta observasi lapangan untuk melihat langsung dinamika sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai dampak eksploitasi kemiskinan terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi lokal. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi kemiskinan dijalankan melalui tiga dimensi kekuasaan, yakni *discipline*, *governmentality*, dan *panoptisisme*. Mekanisme ini membentuk perilaku pemilih dengan menormalkan politik transaksional, mengelola persepsi publik, serta menciptakan rasa diawasi, sehingga memperkuat relasi kuasa yang timpang. **Kesimpulan:** Eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada berkontribusi terhadap pelanggengan struktur klientelisme dan pelemahan praktik demokrasi. Penanggulangan permasalahan ini memerlukan pendekatan multi-dimensi melalui pemberdayaan masyarakat, reformasi pemilu, serta penguatan mekanisme pengawasan..

**Kata Kunci:** Klientelisme Politik, Eksploitasi Kemiskinan, Pilkada

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kupang, telah menjadi isu penting yang sangat mempengaruhi dinamika politik lokal, terutama dalam konteks Pilkada. Kabupaten Kupang, dengan tingkat kemiskinan yang mencakup 21,7% dari total penduduknya pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023), menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah politik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, kemiskinan sering kali dieksploitasi sebagai modal politik oleh elite politik, yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk meraih dukungan suara.

Teori *clientelisme* dalam politik Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Hicken & Nathan (2020), memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana elite politik memanfaatkan ketimpangan ekonomi untuk memenangkan pemilu dengan mengandalkan praktik politik yang tidak berbasis programatik, seperti pembelian suara dan pemberian bantuan materi untuk memperoleh loyalitas pemilih. Penelitian ini relevan karena memperlihatkan bagaimana eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada tidak hanya memperburuk kondisi masyarakat miskin, tetapi juga merusak kualitas demokrasi.

Praktik politik uang atau *vote buying* adalah salah satu bentuk eksploitasi kemiskinan yang sering digunakan dalam pemilu, di mana politisi memberikan bantuan sementara berupa uang atau barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Moser (2008) dalam penelitiannya tentang pemilu di Madagaskar, menjelaskan bagaimana politisi memanfaatkan kemiskinan untuk memperoleh suara melalui alokasi barang publik sebagai imbalan bagi

dukungan politik. Fenomena serupa ditemukan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya dalam Pilkada Kabupaten Kupang, di mana politik uang menjadi instrumen penting bagi kandidat untuk mengumpulkan suara dari masyarakat miskin.

Menurut Jensen & Justesen (2014), kemiskinan memang sering digunakan untuk membeli suara di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Praktik ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan ketergantungan politik di kalangan pemilih miskin, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks Kabupaten Kupang, politik uang sangat erat kaitannya dengan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, yang semakin memperburuk posisi tawar mereka dalam politik.

Sementara itu, Leonard et al. (2010) berpendapat bahwa patronase politik dan relasi kuasa yang terbentuk antara elite dan masyarakat miskin dalam politik lokal di negara-negara berkembang sering kali memperkuat ketidaksetaraan, dengan elite politik mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara memberikan bantuan sementara, yang tidak memberikan solusi struktural bagi masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Hal ini sesuai dengan kondisi di Kabupaten Kupang, di mana politisi cenderung menawarkan solusi jangka pendek untuk mengatasi kemiskinan tanpa mengubah struktur sosial-ekonomi yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri.

Webber (2006) dalam kajiannya mengenai demokrasi patrimonial di Indonesia juga menunjukkan bahwa politik lokal pasca-Suharto masih sangat bergantung pada praktik klientelisme dan politik uang. Kondisi ini memperburuk ketimpangan dan mendorong praktik-praktik yang tidak demokratis, yang menghalangi masyarakat miskin untuk mengakses peluang yang setara dalam sistem politik.

Dalam menghadapi tantangan ini, Saputra et al. (2024) mengingatkan pentingnya kesadaran politik masyarakat sebagai langkah untuk mencegah eksploitasi dalam politik. Mereka menunjukkan bahwa penguatan kesadaran politik masyarakat, termasuk pemilih miskin, adalah langkah awal yang penting dalam mengurangi praktik politik uang yang merugikan dan meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif.

Selain itu, Ma'ruf (2022) menyoroti bahwa kebijakan percepatan pengurangan kemiskinan di tingkat daerah sering kali belum berjalan secara optimal, karena adanya berbagai kendala implementasi serta tumpang tindih dengan kepentingan politik lokal. Dalam konteks Pilkada, kebijakan-kebijakan ini bahkan berpotensi dimanfaatkan oleh elite politik untuk meraih keuntungan elektoral, alih-alih untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Namun demikian, meskipun telah ada upaya untuk membatasi praktik politik uang melalui regulasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 15 Tahun 2023, Suhendi (2020) menunjukkan bahwa penerapan hukum di lapangan sering kali terbentur oleh kendala pembuktian dan tantangan geografis, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Kupang. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam pengawasan pemilu dan penegakan hukum untuk mengatasi eksploitasi kemiskinan dalam politik.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang merupakan bentuk manifestasi dari relasi kuasa yang asimetris antara elite politik dan masyarakat miskin. Mietzner (2024) menambahkan bahwa pembatasan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui praktik politik patronase yang tidak hanya memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga merusak kualitas demokrasi secara keseluruhan.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat banyak kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun praktik eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada tetap menjadi isu yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian politik lokal. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada politik klientelisme secara umum atau politik uang, tanpa melihat bagaimana kemiskinan digunakan sebagai alat untuk mengamankan kemenangan dalam Pilkada di daerah-daerah miskin seperti Kabupaten Kupang. Labolo (2016) menyarankan adanya perubahan dalam sistem pemilihan yang dapat mengurangi praktik politik uang, namun penerapan ide ini dalam Pilkada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kupang masih belum banyak dikaji.

Penguatan kesadaran politik masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada politik patronase merupakan hal yang sangat penting. Saputra et al. (2024) menekankan pentingnya aspek ini, tetapi penelitian yang ada masih belum menggali bagaimana masyarakat miskin di Kabupaten Kupang dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam politik secara lebih otonom, tanpa terjebak dalam permainan politik uang. Oleh karena itu, tantangan utama adalah bagaimana memperbaiki sistem pemilu yang lebih adil, yang tidak hanya menguntungkan elite politik tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk berperan aktif dalam politik.

Anggraini & A. (2022) dalam kajian mereka mengenai migrasi internasional dan ketimpangan global menyarankan adanya kebijakan yang lebih inklusif dalam mengurangi kemiskinan. Namun, penerapan kebijakan ini dalam konteks lokal, seperti di Kabupaten Kupang, masih belum banyak diteliti. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diintegrasikan dalam sistem pemilu lokal untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mengurangi praktik eksploitasi kemiskinan dalam politik lokal.

Robinson, Torvik, & Verdier (2006) menunjukkan bahwa elite politik di negara-negara berkembang sering memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya untuk memperkuat posisi politik mereka. Dalam konteks Pilkada di Kabupaten Kupang, logika serupa sangat relevan — di mana kemiskinan struktural justru menciptakan ladang subur bagi elite politik untuk mengeksploitasi masyarakat miskin sebagai basis suara yang mudah dipengaruhi.

Zulaika et al. (2024) menyoroti tantangan dalam desentralisasi asimetris dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah-daerah dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh desentralisasi ini sering kali memperburuk kondisi masyarakat miskin, yang justru menjadi sasaran eksploitasi politik dalam Pilkada. Hal ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Kupang, di mana ketimpangan sosial dan politik semakin diperburuk oleh desentralisasi yang tidak dikelola dengan baik.

Penelitian oleh Mietzner (2024) menggarisbawahi bahwa persaingan elite dalam sistem politik Indonesia sering memperburuk kualitas demokrasi. Mietzner menjelaskan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki demokrasi, kompetisi elite yang tidak setara seringkali memperburuk kualitas demokrasi lokal. Elite politik yang memanfaatkan kemiskinan untuk memenangkan Pilkada mengurangi keadilan politik, sehingga merusak kualitas partisipasi politik masyarakat miskin dan memperburuk ketimpangan sosial.

Handayani et al. (2023) dalam penelitian mereka tentang *Collaborative Governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar sektor dalam pengelolaan kebijakan sosial yang lebih inklusif. Namun, dalam konteks Kabupaten Kupang, kolaborasi ini masih sangat terbatas, dan belum banyak penelitian yang menggali bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mengurangi praktik politik uang dan meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kemiskinan dieksploitasi sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Selain itu, penelitian ini akan menggali peran elite politik dalam memperburuk ketimpangan sosial dan bagaimana peran pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengurangi eksploitasi politik yang berbasis kemiskinan (Zulaika et al., 2024; Mietzner, 2024; Handayani et al., 2023).

### 1.3. Penelitian Terdahulu

(Hicken & Nathan, 2020) dalam *Annual Review of Political Science* membahas dinamika politik klientelisme, dengan fokus pada pemahaman hubungan antara elite politik dan pemilih dalam konteks politik non-programatik. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam studi klientelisme dan mengusulkan arah baru dalam penelitian politik transaksional yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut dalam konteks Pilkada dan eksploitasi kemiskinan.

(Moser, 2008) dalam *Economic Development and Cultural Change* mengkaji hubungan antara pengentasan kemiskinan, patronase, dan pembelian suara dalam Pemilu 2001 di Madagaskar. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana alokasi barang publik dalam konteks kemiskinan sering kali digunakan untuk memenangkan pemilihan, yang sangat relevan dengan fenomena politik uang dalam Pilkada.

(Jensen & Justesen, 2014) dalam *Electoral Studies* mengungkap bukti survei tentang pengaruh kemiskinan terhadap praktik pembelian suara di Afrika. Artikel ini memberikan perspektif penting mengenai bagaimana kemiskinan menjadi instrumen dalam politik transaksional dan memperkaya pemahaman tentang bagaimana politik uang bekerja dalam pemilu lokal.

(Leonard et al., 2010) dalam *Development and Change* melakukan studi komparatif mengenai apakah patronase politik masih menjadi pendorong utama bagi masyarakat miskin di dunia berkembang. Penelitian ini menyoroti bagaimana sektor peternakan dan politik lokal di berbagai negara berkembang menggambarkan pola patronase yang mengaitkan politik dan kemiskinan.

(Webber, 2006) dalam *Democratization* membahas demokrasi patrimonial yang terhubung dengan pemilihan langsung di Indonesia pasca-Suharto. Penelitian ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa dalam politik lokal, seperti Pilkada, dapat mengarah pada praktik-praktik yang lebih menguntungkan elite politik melalui eksploitasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi.

(Saputra et al., 2024) dalam *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* membahas pentingnya penguatan kesadaran politik di pemerintahan desa menjelang Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Artikel ini memberikan insight tentang bagaimana pemahaman dan partisipasi masyarakat desa dalam politik dapat mempengaruhi integritas Pemilu dan pencegahan praktik eksploitasi kemiskinan.

(Suhendi, 2020) dalam *Jurnal Tatapamong* membahas potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah, terutama terkait dengan politik uang. Artikel ini menggambarkan tantangan dalam menjaga ketertiban dan memastikan pemilu bebas dari eksploitasi kemiskinan.

(Ma'ruf, 2022) dalam *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* membahas implementasi kebijakan percepatan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini memberikan perspektif terkait bagaimana kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang juga berkaitan erat dengan politik lokal dalam Pilkada.

(Robinson et al., 2006) dalam *Journal of Development Economics* mengkaji dasar politik dari fenomena "resource curse" dan bagaimana ketidaksetaraan sumber daya dapat

memengaruhi politik dan kebijakan. Studi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana ketimpangan ekonomi dan eksploitasi dapat mempengaruhi perilaku politik di daerah-daerah miskin, yang relevan dengan konteks eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada.

(Yuda, 2021) dalam *Social Policy and Administration* meneliti peran klientelisme dan familisme dalam pengembangan kebijakan sosial di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana keduanya saling melengkapi dalam politik lokal dan dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada.

(Fukuoka, 2013) dalam *Democratization* menyajikan model klientelis dalam transisi politik Indonesia, khususnya dalam konteks politik lokal pasca-Suharto. Penelitian ini relevan karena menghubungkan fenomena klientelisme dengan dinamika pemilu lokal dan eksploitasi kemiskinan.

(Berenschot, 2018) dalam *Comparative Political Studies* menyelidiki ekonomi politik klientelisme di Indonesia, dengan fokus pada demokrasi patronase dan pengaruhnya terhadap politik lokal. Artikel ini memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana praktik klientelisme dan politik uang berinteraksi dengan kemiskinan dalam Pilkada.

(Labolo, 2016) dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan* menganalisis alternatif mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana mekanisme pemilihan dapat mengurangi praktik eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada.

(Anggraini & Arwanto, 2022) dalam *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* meneliti migrasi internasional dan ketimpangan global, serta implikasinya terhadap kebijakan anti-kemiskinan. Meskipun fokus utamanya bukan politik lokal, artikel ini memberikan wawasan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam Pemilu.

(Mietzner, 2024) dalam *Third World Quarterly* membahas batasan autokratisasi di Indonesia dengan fokus pada kompetisi elite dalam demokrasi yang terkompromikan. Penelitian ini memberikan perspektif penting tentang bagaimana politik lokal di Indonesia berkembang dalam konteks pemilihan kepala daerah dan eksploitasi kemiskinan.

(Zulaika et al., 2024) dalam *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* membahas penanggulangan kemiskinan dalam sistem desentralisasi asimetris, memberikan pemahaman tentang dinamika kemiskinan dan pengaruhnya terhadap kebijakan lokal di Indonesia.

(Handayani et al., 2023) dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* menganalisis kolaborasi pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, memberikan insight terkait kolaborasi pemerintahan dalam konteks pengentasan kemiskinan yang relevan dengan politik lokal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan pendekatan dan fokus yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya terkait praktik eksploitasi kemiskinan dalam konteks politik lokal di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu banyak membahas politik uang atau praktik klientelisme secara umum, atau dalam konteks pemilu nasional dan daerah di kota-kota besar, tanpa fokus khusus pada dinamika eksploitasi kemiskinan di daerah miskin dan terpencil seperti Kabupaten Kupang. Selain itu, studi tentang bagaimana elite politik secara sistematis memanfaatkan kemiskinan sebagai modal politik dalam membangun relasi kuasa di Pilkada, dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan desentralisasi yang asimetris, masih sangat terbatas.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pemahaman empiris yang mendalam mengenai eksploitasi kemiskinan sebagai strategi politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang, dengan mengangkat secara khusus peran elite politik, desain kelembagaan daerah, serta interaksi antara elite dan masyarakat miskin. Penelitian ini juga memperkaya kajian dengan memanfaatkan perspektif tentang bagaimana faktor struktural seperti desentralisasi asimetris

(Zulaika et al., 2024), kompetisi elite yang tidak setara (Mietzner, 2024), serta keterbatasan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan (Handayani et al., 2023) berkontribusi dalam memperkuat pola-pola eksploitasi tersebut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan yang representatif dari berbagai elemen pemangku kepentingan — termasuk elite politik, pejabat pemerintah daerah, pengawas pemilu, dan masyarakat miskin sebagai pemilih — sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana praktik eksploitasi kemiskinan berlangsung dalam proses Pilkada di tingkat lokal. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat teoritis atau kuantitatif dan kurang menggali interaksi sosial-politik dan ketimpangan struktural secara kontekstual (Robinson et al., 2006; Ma'ruf, 2022).

Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi signifikan secara konseptual dan praktis dalam memperkuat pemahaman tentang hubungan antara kemiskinan, relasi kuasa, dan proses politik lokal di wilayah miskin, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemilu dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih adil dan berkelanjutan di daerah seperti Kabupaten Kupang.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana eksploitasi kemiskinan dimanfaatkan sebagai modal politik dalam membangun relasi kuasa pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kupang. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji strategi elite politik dalam memanfaatkan ketimpangan sosial-ekonomi untuk memperoleh dukungan suara, pola interaksi antara elite dan masyarakat miskin, serta peran desain kelembagaan dan dinamika politik lokal yang memengaruhi praktik eksploitasi kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola pemilu, penguatan partisipasi politik masyarakat miskin, dan pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik eksploitasi kemiskinan sebagai modal politik dalam konteks nyata pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kupang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat miskin, strategi yang digunakan oleh elite dalam memanfaatkan kemiskinan, serta dinamika sosial-politik yang tidak mudah diukur secara kuantitatif. Metode kualitatif dipandang tepat dalam konteks ini karena dapat menggali makna, perspektif, dan pengalaman para aktor secara lebih kaya dan kontekstual (Flick, 2014; Creswell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik lokal, baik dari kalangan elite politik maupun masyarakat pemilih miskin. Observasi partisipatif digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik politik uang dan interaksi politik di lapangan, mengingat bahwa banyak praktik eksploitasi kemiskinan berlangsung secara informal dan simbolik (Berenschot, 2018). Sementara itu, analisis dokumentasi dilakukan terhadap kebijakan pemilu, berita, serta dokumen lain yang relevan untuk melengkapi dan menguatkan data temuan lapangan (Moser, 2008; Suhendi, 2020).

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan aktif dan relevansi pengetahuan mereka terhadap praktik politik lokal di Kabupaten Kupang. Sebanyak 10 informan utama dilibatkan, terdiri atas pejabat Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang sebagai informan kunci, elite partai politik yang menjadi kandidat atau tim pemenangan, tokoh masyarakat yang mewakili suara pemilih miskin, serta perwakilan dari LSM dan media lokal yang fokus pada isu demokrasi dan pengentasan kemiskinan. Pemilihan informan dari berbagai latar belakang dilakukan untuk mendapatkan representasi yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti (Fukuoka, 2013; Leonard et al., 2010).

Penelitian ini dilakukan selama dua puluh satu hari di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan dinamika politik lokal yang kuat dipengaruhi oleh praktik politik uang dan relasi klientelisme, sebagaimana telah ditunjukkan dalam penelitian terdahulu (Mietzner, 2024; Yuda, 2021). Waktu penelitian dirancang agar mencakup masa pra-Pilkada dan puncak kampanye aktif, yaitu periode di mana praktik eksploitasi kemiskinan paling sering terjadi dan paling mudah diamati (Jensen & Justesen, 2014).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami secara mendalam praktik eksploitasi kemiskinan sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang, penelitian ini menggunakan kerangka teori relasi kuasa yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Perspektif ini memandang bahwa kekuasaan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan beroperasi secara halus melalui proses normalisasi, pengelolaan persepsi, dan penciptaan rasa diawasi. Dalam konteks Pilkada, kekuasaan elite politik bekerja bukan hanya melalui transaksi material, tetapi juga membentuk kesadaran dan perilaku politik masyarakat miskin.

Dalam penelitian ini, tiga dimensi utama dari teori Foucault digunakan sebagai pijakan analisis, yaitu Disiplin, Governmentality, dan Panopticism. Ketiga dimensi ini membantu menjelaskan bagaimana praktik eksploitasi kemiskinan tidak hanya menciptakan ketergantungan ekonomi, tetapi juga menginternalisasi mekanisme kontrol sosial yang memperkuat relasi kuasa antara elite dan masyarakat miskin. Melalui kerangka ini, proses pembentukan pilihan politik masyarakat dalam situasi kemiskinan struktural dapat dipahami secara lebih utuh, melampaui sekadar logika politik transaksional.

Bagian berikut akan menguraikan temuan penelitian berdasarkan ketiga dimensi tersebut, untuk menggambarkan bagaimana praktik eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang dijalankan, serta bagaimana dampaknya terhadap relasi kuasa dan kualitas demokrasi lokal.

#### 3.1. **Discipline**

Selain melalui pembiasaan norma sosial, kekuasaan juga beroperasi melalui pengelolaan persepsi dan cara berpikir masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi Governmentality menjadi penting untuk dianalisis. Dimensi ini mengungkap bagaimana elite politik tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga secara sistematis membentuk cara masyarakat memahami makna bantuan tersebut, serta mengatur perhatian mereka agar terfokus pada aspek pragmatis, bukan pada kebijakan substantif atau visi jangka panjang.

Menurut (Foucault, 1971) Discipline adalah mekanisme kekuasaan yang berfungsi membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat melalui proses normalisasi dan internalisasi aturan. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kupang, dimensi Discipline tampak melalui kebiasaan masyarakat menerima bantuan menjelang pemilihan sebagai sesuatu yang wajar.

Indikator pertama, yaitu masyarakat menerima bantuan sebagai kebiasaan politik menjelang Pilkada, terwujud dalam narasi yang berkembang luas di tingkat akar rumput. Warga mengakui bahwa setiap menjelang Pilkada, mereka memang mengantisipasi kedatangan bantuan dalam berbagai bentuk, mulai dari sembako hingga uang tunai. Proses ini telah menjadi

ritual yang dianggap bagian dari dinamika pemilu, sehingga masyarakat tidak lagi mempertanyakan motif di baliknya.

Indikator kedua, tidak adanya penolakan bantuan karena takut kehilangan akses sosial, juga sangat jelas. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima bantuan bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena kekhawatiran jika menolak, mereka akan terisolasi secara sosial atau kehilangan akses terhadap program bantuan lain di masa depan. Rasa takut ini mendorong kepatuhan sukarela yang sangat sesuai dengan konsep *disciplinary power*.

Sementara itu, indikator pilihan politik ditentukan oleh relasi balas budi semakin memperkuat dimensi ini. Proses penerimaan bantuan menciptakan rasa utang budi di kalangan masyarakat miskin, yang secara implisit diarahkan untuk membalas kebaikan elite politik di bilik suara. Pilihan politik masyarakat bukan lagi didasarkan pada evaluasi program atau kualitas kandidat, melainkan pada rasa kewajiban moral yang telah ditanamkan melalui praktik bantuan tersebut.

Dengan demikian, dimensi Discipline menggambarkan bahwa elite politik di Kabupaten Kupang berhasil menciptakan budaya politik di mana penerimaan bantuan dan dukungan politik saling terkait secara normatif, memperkuat pola relasi kuasa yang timpang.

### **3.2. Governmentality**

Selain membentuk persepsi, kekuasaan dalam Pilkada juga beroperasi melalui penciptaan rasa diawasi yang bersifat implisit. Dimensi Panopticism membantu memahami bagaimana rasa diawasi ini mendorong masyarakat miskin untuk secara sukarela mengatur pilihan politik mereka sesuai dengan ekspektasi elite.

Konsep governmentality menurut (Foucault, 1971) mengacu pada seni mengatur perilaku masyarakat melalui pengelolaan persepsi, norma, dan wacana. Dalam Pilkada Kabupaten Kupang, governmentality tampak dalam cara elite politik mengarahkan pemahaman masyarakat miskin terhadap makna bantuan yang mereka terima.

Indikator pertama, yaitu persepsi masyarakat miskin tentang bantuan sebagai bentuk kepedulian atau strategi politik, menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat memahami bahwa bantuan berkaitan dengan politik, banyak pula yang tetap menginternalisasi narasi bahwa elite “peduli pada rakyat kecil.” Hal ini menunjukkan keberhasilan elite dalam mengaburkan batas antara kepedulian tulus dan strategi politik.

Indikator kedua, jenis bantuan yang diberikan dan keterkaitannya dengan pencapaian tujuan politik, terlihat dari pemilihan jenis bantuan yang sangat terfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti sembako, minyak goreng, dan uang tunai. Strategi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, sehingga efek psikologisnya lebih kuat dan mendorong loyalitas jangka pendek.

Indikator ketiga, penekanan bantuan sebagai bahan kampanye yang mengalihkan perhatian dari diskusi kebijakan jangka panjang, tampak dari strategi kampanye yang menghindari pembahasan program atau visi-misi kandidat secara substantif. Pendekatan yang dipilih lebih menonjolkan sentuhan personal melalui pemberian bantuan, sehingga masyarakat cenderung fokus pada siapa yang “berbuat baik” kepada mereka, bukan pada kualitas kebijakan yang ditawarkan.

Dengan demikian, governmentality dalam konteks ini berhasil membentuk cara berpikir masyarakat miskin, mengkonstruksi persepsi bahwa partisipasi politik dapat dikompensasikan dengan bantuan material, alih-alih dengan proses deliberatif yang rasional.

### **3.3. Panopticism**

Melalui analisis terhadap ketiga dimensi tersebut, dapat dilihat bahwa eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang merupakan praktik kekuasaan yang kompleks,

berlapis, dan bekerja di berbagai level, mulai dari pembentukan norma sosial, pengelolaan persepsi, hingga penciptaan rasa diawasi. Kombinasi ketiganya menghasilkan relasi kuasa yang memperkuat ketergantungan masyarakat miskin pada elite politik, sekaligus menghambat terciptanya proses demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Dimensi panopticism, sebagaimana dikemukakan (Foucault, 1971) menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui pengawasan yang implisit, sehingga individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya. Dalam Pilkada Kabupaten Kupang, panopticism tampak dalam strategi kampanye dan distribusi bantuan yang secara halus menciptakan rasa diawasi di kalangan masyarakat miskin.

Indikator pertama, penggunaan propaganda atau kampanye yang berfokus pada kelompok miskin, dilakukan dengan sangat terstruktur. Tim kampanye secara aktif membangun citra bahwa kandidat adalah sosok yang peduli, menggunakan pendekatan emosional yang menyentuh perasaan masyarakat. Proses distribusi bantuan dilakukan secara simbolik, sering kali pada malam hari atau dengan cara yang membangun rasa kedekatan personal.

Indikator kedua, perasaan bahwa mereka dipantau atau diatur dalam pemilu, sangat terasa di tingkat masyarakat bawah. Banyak warga yang mengaku merasa bahwa pilihan politik mereka dapat diketahui oleh elite atau perangkat desa, sehingga mereka cenderung “bermain aman” dalam menentukan pilihan. Perasaan ini menciptakan pengawasan internal, di mana masyarakat mengatur sendiri perilaku politik mereka agar tidak melanggar ekspektasi yang dibangun oleh elite.

Dengan demikian, dimensi panopticism dalam Pilkada Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa kekuasaan beroperasi tidak hanya melalui pengawasan fisik, tetapi juga melalui penciptaan rasa bahwa setiap tindakan politik diawasi dan memiliki konsekuensi. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih untuk patuh demi menjaga rasa aman dan kelangsungan akses terhadap sumber daya.

Dengan memanfaatkan ketiga dimensi ini, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang merupakan praktik kekuasaan yang sangat halus namun efektif. Melalui Discipline, masyarakat dibiasakan untuk menerima bantuan sebagai ritual politik; melalui governmentality, mereka diajarkan untuk melihat bantuan sebagai kepedulian yang patut dibalas; dan melalui panopticism, mereka merasa terus diawasi, sehingga perilaku politik mereka diatur secara sukarela. Relasi kuasa yang tercipta pun semakin memperkuat ketimpangan antara elite politik dan masyarakat miskin, menjadikan demokrasi lokal rentan terhadap manipulasi yang berlapis.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa praktik eksploitasi kemiskinan sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang berlangsung melalui tiga dimensi utama kekuasaan dalam perspektif Michel Foucault, yaitu Discipline, Governmentality, dan Panopticism. Masing-masing dimensi tersebut menunjukkan bagaimana relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat miskin dibangun, dipertahankan, dan direproduksi dalam konteks pemilu lokal yang diwarnai oleh ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pada dimensi *Discipline*, temuan ini sejalan dengan temuan penelitian (Moser, 2008) yang menunjukkan bahwa politik uang dalam pemilu sering kali menggunakan bantuan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa pemberian bantuan menjelang pemilu menjadi hal yang umum di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana masyarakat miskin secara sosial terikat pada kandidat yang memberikan bantuan (Jensen & Justesen, 2014). Di Kabupaten Kupang, penerimaan bantuan diartikan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan diantisipasi menjelang Pilkada. Tidak adanya penolakan atas bantuan yang diberikan menunjukkan bahwa masyarakat miskin terjebak dalam ketergantungan material yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang

mengikat mereka. Seperti yang disebutkan oleh (Leonard et al., 2010), di negara-negara berkembang, dominasi politik melalui patronase berperan besar dalam memperkuat ketergantungan masyarakat pada elite politik, dan hal ini ditemukan pula di Kupang.

Berbeda dengan temuan penelitian (Hicken & Nathan, 2020) yang menekankan bahwa praktik clientelisme dalam banyak kasus hanya menguntungkan elite politik dalam jangka pendek, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa politik uang di Kabupaten Kupang tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga memperburuk kualitas demokrasi. (Foucault, 1971) juga berpendapat bahwa kekuasaan bekerja melalui internalisasi norma yang mengatur perilaku masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Foucault bahwa kekuasaan tidak harus datang dalam bentuk paksaan langsung, tetapi dapat muncul dalam bentuk kontrol yang lebih subtil, seperti pembentukan kebiasaan politik yang berulang.

Pada dimensi *Governmentality*, temuan ini memperkuat hasil penelitian (Fukuoka, 2013) yang menyatakan bahwa politik clientelisme di Indonesia tidak hanya dimotivasi oleh kebutuhan akan suara, tetapi juga melalui pengelolaan persepsi masyarakat miskin mengenai bantuan yang diberikan. Sama halnya dengan temuan penelitian (Saputra et al., 2024) yang menyoroti pentingnya kesadaran politik masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada politik patronase, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh elite politik sering kali dianggap sebagai bentuk kepedulian pribadi, bukan sebagai strategi untuk meraih dukungan politik. Bantuan tersebut lebih terfokus pada kebutuhan dasar masyarakat yang tidak terpenuhi, seperti sembako dan perawatan rumah, yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan jangka pendek terhadap elite politik. Penekanan pada bantuan ini mengalihkan perhatian masyarakat dari diskusi mengenai kebijakan publik yang lebih substantif atau visi pembangunan jangka panjang, seperti yang diungkapkan oleh (Mietzner, 2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan politik yang mengandalkan politik uang seringkali mengurangi efektivitas partisipasi politik masyarakat.

Sementara itu, dimensi Panopticism menunjukkan bagaimana rasa diawasi secara implisit menjadi instrumen yang memperkuat ketundukan masyarakat. Temuan ini serupa dengan yang ditemukan oleh (Berenschot, 2018) yang menekankan bagaimana kekuasaan melalui pengawasan sosial dapat memperkuat dominasi elite politik. Dalam konteks Kabupaten Kupang, meskipun pengawasan yang dilakukan oleh elite politik tidak bersifat langsung, masyarakat merasa bahwa pilihan politik mereka bisa diketahui, dan ini akan memengaruhi akses mereka terhadap bantuan di masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh (Foucault, 1971) dalam teori panopticism, pengawasan yang tidak tampak secara jelas ini lebih efektif dalam mengontrol masyarakat karena menciptakan rasa takut dan ketergantungan tanpa harus menggunakan kekuatan fisik. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat miskin, meskipun merasa tidak dipaksa secara langsung untuk memilih kandidat tertentu, tetap tunduk pada kekuasaan tersebut karena ketakutan akan kehilangan akses sosial dan materi.

Meskipun begitu, temuan ini juga menolak temuan (Suhendi, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga seperti Bawaslu dapat menanggulangi praktik politik uang. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan, praktik politik uang tetap sulit ditindaklanjuti karena seringkali tidak ada bukti yang jelas. Masyarakat miskin sendiri sering merasa terjebak dalam dilema moral antara menerima bantuan yang mereka butuhkan dan mempertahankan kemandirian politik mereka. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat pandangan bahwa praktik politik uang yang terselubung semakin sulit untuk diberantas tanpa adanya perubahan mendalam dalam sistem sosial dan kebijakan pemilu.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang bukan sekadar praktik politik transaksional yang bersifat jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari relasi kuasa yang lebih kompleks dan berlapis. (Foucault, 1971) dalam teori kekuasaannya menggarisbawahi bahwa kekuasaan

bekerja lebih efektif melalui mekanisme halus yang membentuk perilaku dan kesadaran masyarakat, bukan hanya melalui represi langsung. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kekuasaan elite politik di Kabupaten Kupang tidak hanya memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku mereka dalam menghadapi pemilu. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan kapasitas mereka dalam membuat keputusan politik yang rasional, dan menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan berkeadilan.

Faktor pendukung utama dalam praktik eksploitasi kemiskinan adalah adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang tidak memadai dari pemerintah, sementara faktor penghambatnya adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap politik uang. Meski ada upaya dari lembaga pengawas, tantangan yang dihadapi tetap besar, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Selain temuan utama yang telah dianalisis sebelumnya, penelitian ini juga mengungkap sejumlah temuan menarik lain yang memiliki implikasi penting dalam memahami dinamika eksploitasi kemiskinan sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang Tahun 2019.

Pertama, terdapat pola keterlibatan tokoh agama dan adat dalam pembentukan preferensi politik masyarakat miskin. Meskipun tidak secara eksplisit terlibat dalam praktik politik transaksional, para tokoh ini sering dijadikan rujukan moral dan sosial yang memperkuat legitimasi kandidat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik turut berperan dalam melanggengkan relasi kuasa yang timpang.

Kedua, peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat pemilih menyadari bahwa bantuan atau uang yang mereka terima menjelang pemilu bersifat temporer dan manipulatif. Namun, keterdesakan ekonomi membuat mereka tetap menerima dan mendukung kandidat tertentu. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas antara kesadaran politik dan kebutuhan hidup sehari-hari, yang menjadikan praktik politik uang bukan semata-mata soal kebodohan politik, melainkan strategi adaptif dalam situasi ketidakpastian ekonomi.

Ketiga, meskipun program-program pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan telah berjalan, masih ditemukan ketimpangan dalam distribusi program bantuan sosial. Beberapa informan menyebutkan bahwa bantuan sering diberikan berdasarkan kedekatan dengan elite lokal atau tim sukses, bukan atas dasar kebutuhan objektif. Hal ini menguatkan temuan bahwa kemiskinan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi alat negosiasi politik dan alat kontrol sosial.

Keempat, hasil observasi juga menunjukkan adanya apatisisme politik di kalangan generasi muda yang berasal dari keluarga miskin. Mereka cenderung merasa bahwa keterlibatan dalam pemilu tidak berdampak langsung terhadap perubahan kondisi hidup mereka. Sikap ini muncul sebagai bentuk resistensi pasif terhadap politik klientelistik yang tidak memberi ruang bagi partisipasi yang bermakna.

Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman atas praktik eksploitasi kemiskinan dalam konteks lokal dan menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam merancang strategi antipemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada perubahan budaya politik dan distribusi kekuasaan yang lebih adil.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi kemiskinan sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang berlangsung melalui tiga dimensi utama kekuasaan dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, yaitu Disiplin, Governmentality, dan Panopticism. Setiap dimensi memperlihatkan bagaimana elite politik secara sistematis membentuk pola pikir, persepsi, dan perilaku politik masyarakat miskin melalui normalisasi penerimaan bantuan, pengelolaan wacana, serta penciptaan rasa diawasi. Proses ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana masyarakat miskin menjadi subjek politik yang patuh secara sukarela, sementara elite memperkuat dominasi mereka dalam sistem demokrasi lokal.

Dengan mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang bukan sekadar praktik politik pragmatis, tetapi merupakan bagian dari operasi kekuasaan yang kompleks dan terstruktur. Relasi kuasa yang terbentuk memperlemah kualitas demokrasi dan memperkuat ketergantungan masyarakat miskin terhadap elite politik. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat, penguatan pengawasan pemilu, serta reformasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada kemandirian dan keadilan sosial.

Secara lebih mendalam, penelitian ini juga mengungkap bahwa praktik eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada Kabupaten Kupang berkontribusi pada pembentukan siklus ketergantungan yang memperlemah kemandirian politik masyarakat miskin. Melalui mekanisme relasi kuasa yang bersifat halus namun efektif, elite politik tidak hanya mengondisikan pilihan politik masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur patron-klien yang sulit diputus. Dalam situasi seperti ini, proses demokrasi yang seharusnya mendorong partisipasi yang rasional dan berbasis kesetaraan justru tergantikan oleh pola interaksi yang bersifat transaksional dan pragmatis.

Selain itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan formal terhadap praktik eksploitasi kemiskinan masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan pengawas pemilu maupun dari tingkat literasi politik masyarakat. Lemahnya bukti hukum, ketakutan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, serta normalisasi praktik politik uang di tingkat akar rumput memperkuat keberlangsungan pola eksploitasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan pendidikan politik, reformasi sistem bantuan sosial, serta peningkatan kapasitas pengawasan yang berbasis komunitas.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang terbatas pada Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2019, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, jumlah informan yang terbatas dan sensitivitas isu yang dibahas menjadi tantangan dalam pengumpulan data yang mendalam. Beberapa narasumber kunci, khususnya dari elite politik, cenderung memberikan informasi yang bersifat normatif atau defensif, sehingga interpretasi data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk menjaga validitas temuan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dengan melakukan studi komparatif di berbagai daerah lain yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai eksploitasi kemiskinan dalam konteks pemilu lokal di Indonesia. Pendekatan metode campuran (*mixed-method*) juga direkomendasikan untuk menggali tidak hanya perspektif elite politik dan pengawas pemilu, tetapi juga pengalaman dan persepsi masyarakat secara lebih luas. Selain

itu, kajian mendalam mengenai peran media, jejaring sosial lokal, dan mekanisme informal pengawasan dalam proses reproduksi relasi kuasa juga sangat dibutuhkan untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif dalam memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para informan dari Pemerintah Kabupaten Kupang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang, tokoh masyarakat, serta masyarakat miskin di berbagai kecamatan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat berharga. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan profesionalisme telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan kualitas demokrasi lokal dan mendorong praktik pemilu yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., & Arwanto. (2022). International Migration, Global Inequalities and Its Implication on Anti-Poverty Policy. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(22), 22–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2659>  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/2659>
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>
- Foucault, M. (1971). Order of Discourse. *Social Science Information*, 10(2), 7–30. <https://doi.org/10.1177/053901847101000201>
- Fukuoka, Y. (2013). Indonesia's "democratic transition" revisited: A clientelist model of political transition. *Democratization*, 20(6), 991–1013. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.669894>
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Hicken, A., & Nathan, N. L. (2020). Clientelism's Red Herrings: Dead Ends and New Directions in the Study of Nonprogrammatic Politics. *Annual Review of Political Science*, 23, 277–294. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032657>
- Jensen, P. S., & Justesen, M. K. (2014). Poverty and vote buying: Survey-based evidence from Africa. *Electoral Studies*, 33, 220–232. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.020>
- Labolo, M. (2016). Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan ...*, VIII(12), 1–15. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79>  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79>
- Leonard, D. K., Brass, J. N., Nelson, M., Ear, S., Fahey, D., Fairfield, T., Gning, M. J., Halderman, M., McSherry, B., Moehler, D. C., Prichard, W., Turner, R., Vu, T., & Dijkman, J. (2010). Does patronage still drive politics for the rural poor in the developing world? A comparative perspective from the livestock sector. *Development and Change*, 41(3), 475–494. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2010.01647.x>
- Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the Poverty Reduction Acceleration Policy in Karawang Regency, Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(2), 77–91. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2715> <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/2715>

- Mietzner, M. (2024). The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *Third World Quarterly*, 46(2), 153–169. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Moser, C. (2008). Poverty reduction, patronage, or vote buying? The allocation of public goods and the 2001 election in Madagascar. *Economic Development and Cultural Change*, 57(1), 137–162. <https://doi.org/10.1086/590458>
- Robinson, J. A., Torvik, R., & Verdier, T. (2006). Political foundations of the resource curse. *Journal of Development Economics*, 79(2), 447–468. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2006.01.008>
- Saputra, R., Ilham, T., Jaelani, R., & Safitri, D. (2024). Dimulai dari Elit : Penguatan Kesadaran Politik Pemerintahan Desa untuk Menyambut Pemilu Serentak 2024 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Starting from Elite : Strengthening Political Governments to Welcome Elections in Jatiwa. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 3(2). <https://doi.org/10.33701/cc.v3i2.3521>  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/3521>
- Suhendi, D. (2020). Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung). *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 51–70. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246>  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1246>
- Webber, D. (2006). A consolidated patrimonial democracy? Democratization in post-Suharto Indonesia. *Democratization*, 13(3), 396–420. <https://doi.org/10.1080/13510340600579284>
- Yuda, T. K. (2021). The complementary roles between clientelism and familism in social policy development. *Social Policy and Administration*, 55(7), 1370–1392. <https://doi.org/10.1111/spol.12738>
- Zulaika, S., Zul Fauzi, F., & Suryapuspita, M. (2024). Poverty Alleviation in Special Autonomy Systems: Dynamics and Challenges of Asymmetric Decentralization. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4286>  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/4286>